

ABSTRAK

Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki- laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 Undang- undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kasus Bupati Garut H.M.Fikri yang diduga melakukan pelanggaran hukum karena telah melakukan pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Fany Octora yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Garut Jawa Barat. H.M.Fikri diancam dengan pasal 37, 280, 310 dan 335 KUHP. Metode yang dilakukan pendekatan ini yang digunakan adalah perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, pada dasarnya merupakan bahan hukum tataran yang dianalisis secara deduktif dan digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa H.M.Fikri bersalah karena telah melanggar tindak hukum pidana. H.M.Fikri diancam dengan beberapa pasal dan dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Daerah karena sudah melanggar sumpah/janji jabatan. Pejabat pemerintah seharusnya dapat menjadi seorang pemimpin yang menjadi panutan dalam masyarakat. Selain itu pemerintah harus lebih berhati hati atau bisa dikatakan lebih selektif dalam menentukan calon pemimpin atau calon pejabat daerah pemerintah harus detail melihat karakteristik seseorang untuk dijadikan Kepala Daerah.

Kata kunci : Aspek pidana,Perkawinan dibawah umur

ABSTRACT

Marriage is an activity of a pair of men and women are related to a common goal to be achieved. In Article 1 of the Law of Marriage (UUP) 1 of 1974 clearly stated above, that the purpose of marriage form the family (household) are happy and eternal based on God. In the case of Garut Regent HMFikri suspected violation of law for committing marriage to a woman named Fany Octora residing in the Garut district of West Java. H.M.Fikri threatened with article 37, 280, 310 and 335 of the Criminal Code. The method used made this approach is legislation. The legal materials obtained from literature, is basically a matter of law that the level of deductively analyzed and combined with regulatory approach. The results of this analysis indicate that HMFikri guilty of violating criminal law acts. H.M.Fikri threatened with several articles and was fired from his position as Head of Region because it violated the oath of office. Government officials should be able to be a leader who is a role model in society. In addition the government should be more cautious or can be said to be more selective in determining future leaders or local government official candidates should detail the characteristics of a person's look to be the Regional Head.

Keywords: criminal aspect, underage marriage